



Kebijakan APBN 2018





DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN



APBN

Pokok-Pokok Kebijakan APBN 2018

BUDGET GOES TO CAMPUS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Yogyakarta, 21 November 2017

KEBIJAKAN STRATEGIS

Mitigasi risiko Fiskal

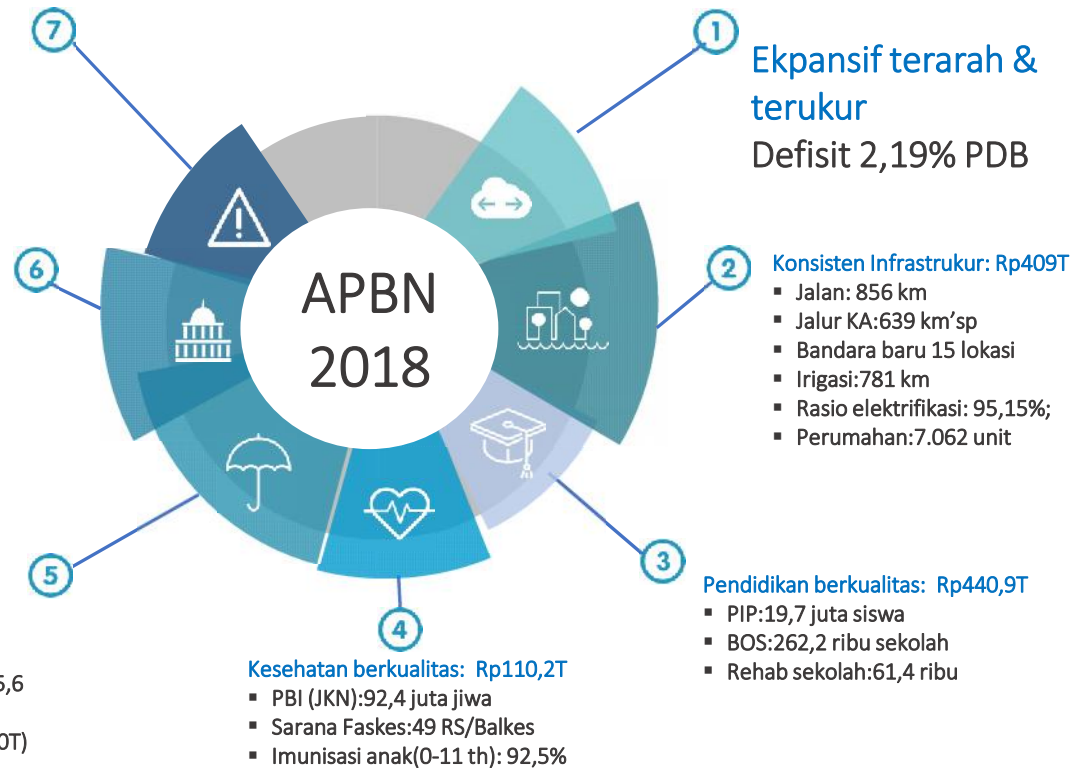
- SAL;
- Dana cadangan risiko fiskal;
- Payung hukum (pasal krisis);
- BSF,

Perbaiki kualitas Pelayanan Publik

- Kesejahteraan aparatur negara & pensiunan;
- Kenaikan uang lauk pauk (Rp55 rb →Rp60 rb);
- Pemantapan reformasi brokrasi

Program perlindungan sosial

- PKH;10 juta KPM (Rp17,3T);
- BidikMisi:401,5 ribu Mhs(Rp4,1T)
- JKN :92,4 jt KPM (Rp25,5T)
- PIP:19,7 jt siswa (Rp10,8T)
- Subsidi &bantuan pangan:15,6 juta KPM (Rp13,4T)
- Dana desa:74.958 desa(Rp60T)



Mengelola Harmoni Postur APBN



Penerimaan Proyeksi & Estimasi

Membuat estimasi penerimaan yang **akurat dan kredibel**

Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara

Rasio penerimaan perpajakan masih **rendah**



Belanja Komitmen

Membuat keputusan belanja yang **strategis**

Memprioritaskan **belanja produktif** dan **mendukung pembangunan**

Mengurangi **kemiskinan, kesenjangan, dan pemerataan** kesejahteraan

Memerangi **inefisiensi dan korupsi**



Pembiayaan *Sustainability*

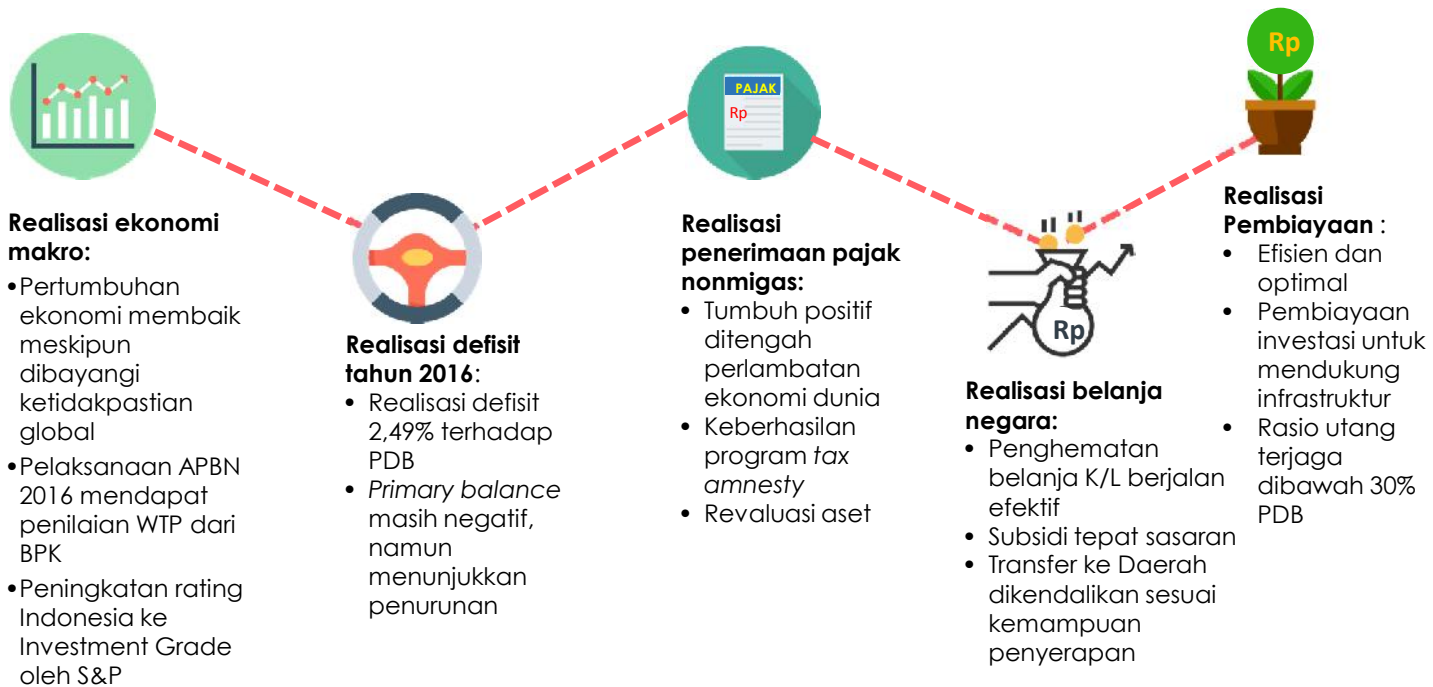
Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan

Mendukung **keuangan inklusif**

Diimbangi dengan **stabilitas sistem keuangan**

Lesson Learnt dari APBN tahun 2016

Meskipun terdapat guncangan perekonomian global, namun perekonomian Indonesia tetap tumbuh di atas 5%, defisit APBN terjaga di tingkat 2,49%, dengan output yang terjaga.



Lesson Learnt dari APBN Tahun 2017

Realisasi semester I tahun 2017 jauh lebih baik, sehingga APBN tetap terjaga

Semester 1



Pelaksanaan APBN 2017 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan semester I tahun 2016, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.



Realisasi penerimaan perpajakan semester I jauh lebih baik dari tahun lalu, a.l.:

- Tumbuh sebesar 9,6% (negatif 2,4% pada th 2016), bahkan tanpa tax amnesty tetap tumbuh 5,6%.
- PPN tumbuh 13,5% (2016 : -3,1%)



Realisasi penyerapan belanja negara semester I, 43 persen dari pagunya, lebih baik dari tahun lalu:

- Belanja K/L lebih efisien
- Subsidi lebih tepat sasaran
- Transfer ke Daerah berbasis kinerja



Realisasi penerbitan utang melalui (SBN neto) turun (tumbuh negatif 23,3 persen)

APBPN 2017



RUU APBPN Tahun 2017 menjaga kredibilitas APBN dan mengantisipasi perkembangan global yang dinamis










Langkah-langkah Rasionalisasi target pendapatan negara, fokus pada langkah efisiensi belanja negara, dan realokasi sektor produktif



Mengendalikan utang secara terukur, dan untuk kegiatan produktif. Rasio utang terhadap PDB tetap dibawah 30 persen




Indikator Ekonomi Makro sebagai basis penyusunan APBN tahun 2018, dengan optimisme pertumbuhan yang lebih tinggi

	Realisasi 2016	APBNP 2017	APBN 2018
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,2	5,4
 Inflasi (% yoy)	3,0	4,3	3,5
 Nilai Tukar (Rp/USD)	13.307	13.400	13.500
 Suku Bunga SPN (%)	5,7	5,2	5,3
 Harga Minyak (US\$/barrel)	40	48	48
 Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	829	815	800
 Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.180	1.150	1.200

Defisit APBN tahun 2018 diupayakan turun dari tahun sebelumnya

 **2,19% PDB**
(2017 : 2,67% PDB)

 **Penerimaan Perpajakan**
1.609,4 (85,6%)

 **PNBP**
267,9 (14,3%)

 **HIBAH**
1,2 (0,1%)

Pendapatan Negara
1.878,4
Outlook 2017: 1.736,1



Belanja Pemerintah Pusat

1.443,3

- Belanja K/L 814,1
- Belanja Non K/L 629,2



Transfer Ke Daerah & Dana Desa
761,1

Belanja Negara

2.204,4

Outlook 2017: 2.098,9



Keseimbangan Primer

(78,4)

Outlook 2017: (144,3)



Defisit Anggaran

(325,9)

Outlook 2017: (362,9)



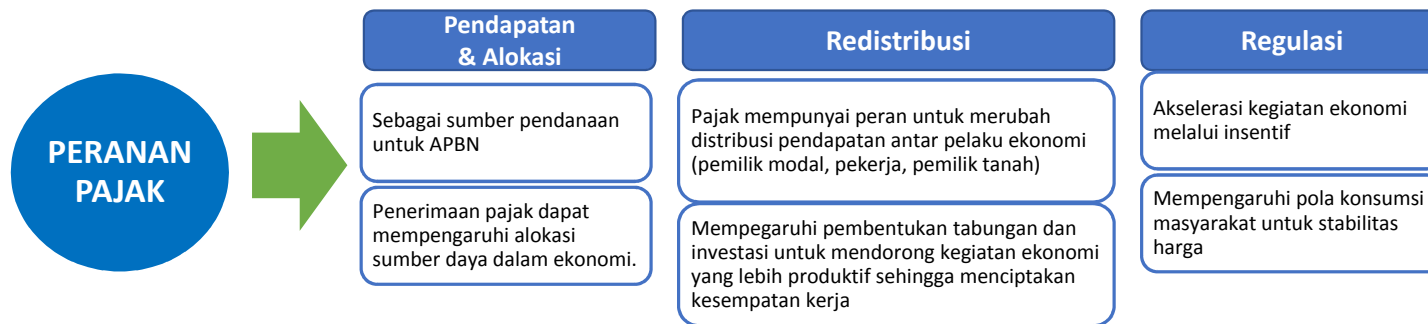
Pembiayaan Anggaran

325,9

- Pembiayaan Utang 399,2
- Pembiayaan investasi (65,7)



PERANAN PAJAK DALAM PEREKONOMIAN



PAJAK SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DALAM APBN
Walaupun *tax ratio* cenderung menurun namun kontribusi pajak untuk APBN makin membesar



PAJAK UNTUK REDISTRIBUSI PENDAPATAN

AS AN INSTRUMENT

Kebijakan perpajakan secara langsung mempengaruhi pola distribusi pendapatan (*collect more from rich and otherwise*)

AS SOURCE OF FUND

Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai program Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan/kemiskinan

REFORMASI PERPAJAKAN MERUPAKAN PRIORITAS

AMNESTI PAJAK Merupakan langkah awal reformasi kebijakan perpajakan

REFORMASI SELANJUTNYA

- Reformasi Regulasi : Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Revisi UU PPN, Revisi UU PPH Revisi UU Bea Materai
- Reformasi Administrasi : Peningkatan efektivitas penegakan hukum, Peningkatan kualitas sistem IT perpajakan, Manajemen database pajak yang lebih baik, Perbaikan kapasitas dan kapabilitas SDM

STRATEGI OPTIMALISASI PERPAJAKAN

Mendorong *Tax compliance*

Sistem perpajakan yang berorientasi kepada wajib pajak di mana prinsip *simple* dan *convienece*

Memperkuat Basis Pajak

Memperkuat basis data perpajakan
Merancang insentif dan *exemption* yang selektif dan efisien

Penggalian Potensi Pajak Sektoral

Meningkatkan *collection* dan memperkecil gap antara potensi dan realisasi penerimaan pajak

Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Baru

Menambah objek kena cukai sebagai sumber pendanaan baru seiring dengan kebijakan pembatasan konsumsi barang tertentu dalam rangka mengurangi eksternalitas

KEBIJAKAN PERPAJAKAN UNTUK REDISTRIBUSI PENDAPATAN

- Menyusun Tarif PPh OP yang *progressive*
- Optimalisasi PPN sebagai sumber penerimaan karena bersifat netral dan sustainable
- Mengoptimalkan pajak terhadap aset dan *capital*



Penerimaan Perpajakan ditingkatkan dengan Realistis, berbasis pencapaian 2 tahun terakhir

- Perbaiki iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif (Tax Incentives)
- Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan
- Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)



● Pertumbuhan (%)

Langkah-langkah a.l. :

- Automatic Exchange of Information (AEOI)
- meningkatkan basis pajak
 - mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)

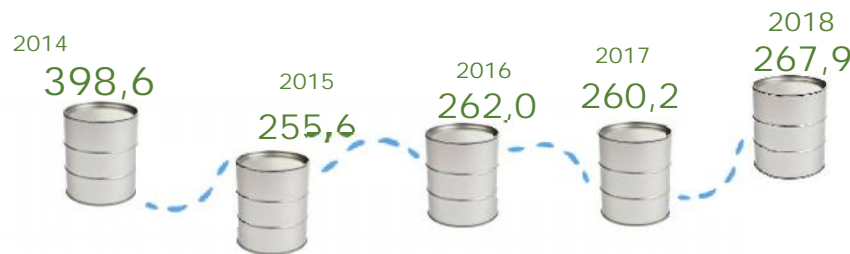
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.

(triliun rupiah)



PNBP tetap dioptimalkan dengan menjaga keseimbangan pemanfaatan SDA serta pelayanan publik

(triliun rupiah)



Target 2018

267,9

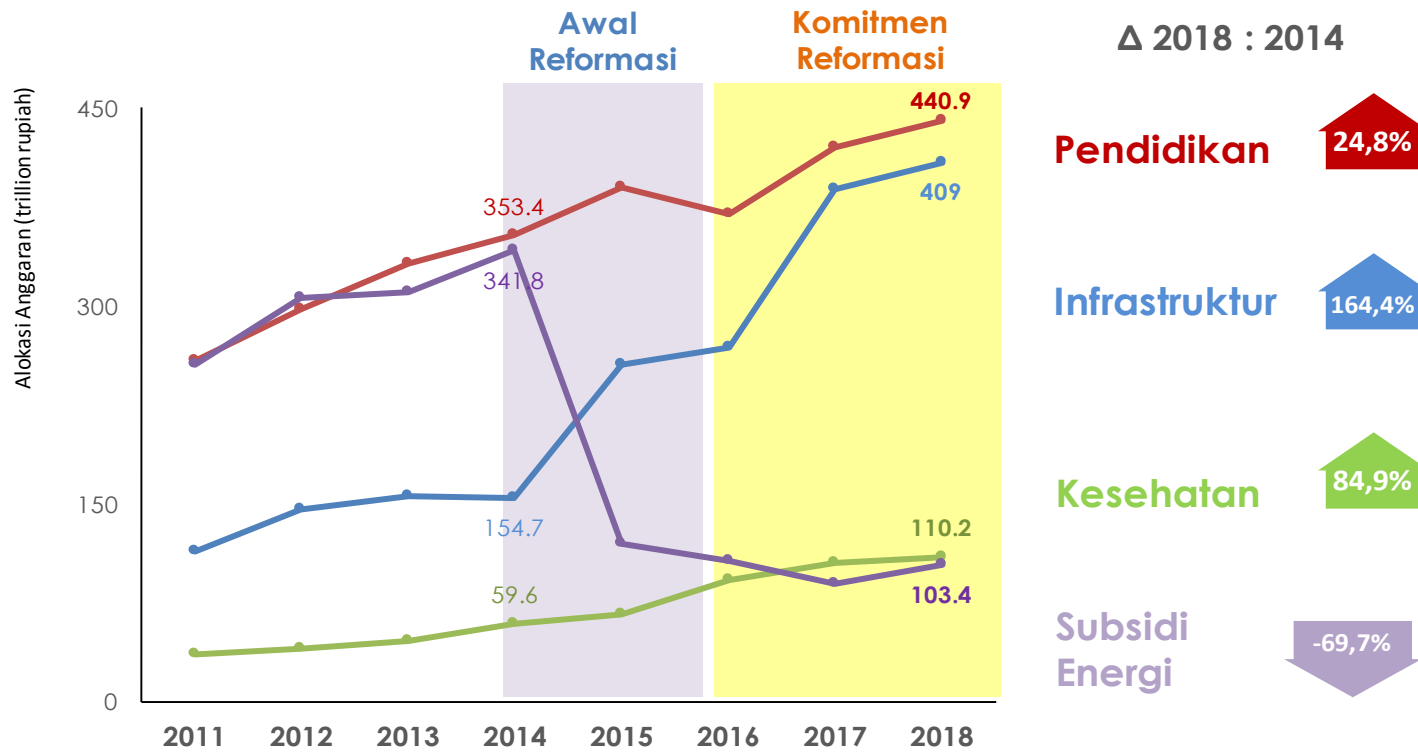
Outlook 2017: 260,2



Pendapatan SDA	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	PNBP Lainnya	Pendapatan BLU
99,3	43,7	82,0	43,0
<ul style="list-style-type: none"> SDA Migas: 77,2 SDA Nonmigas: 22,1 Minerba: 16,8 Panas bumi: 0,7 Kehutanan: 4,1 Perikanan: 0,5 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Pemerintah atas Laba BUMN: Perbankan: 11,0 Non Perbankan: 32,7 	<ul style="list-style-type: none"> 3 K/L Terbesar: Kemkominfo: 15,4 Polri: 8,7 Kemenhub: 7,0 	<ul style="list-style-type: none"> 3 K/L dengan Pendapatan BLU Terbesar: Kemenkeu: 13,9 Kemenkes: 11,1 Kemenristek Dikti: 6,4

REFORMASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Porsi Alokasi Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan Ditingkatkan dalam APBN



APBN TAHUN 2017

Pendapatan Negara
1.736,1



Belanja Negara
2.133,3

2.098,9
(outlook)



2,67%
(defisit outlook)

APBN TAHUN 2018

Pendapatan Negara
1.894,7



Belanja Negara
2.220,7



2,19%
(defisit)



Defisit Anggaran
(397,2)
(362,9) → outlook



Pembiayaan Anggaran

397,2
362,9 → outlook



Keseimbangan Primer
(178,0)
(144,3) → outlook

Pembiayaan Utang 461,3
Pembiayaan investasi (65,2)



Defisit Anggaran
(325,9)



Pembiayaan Anggaran

325,9



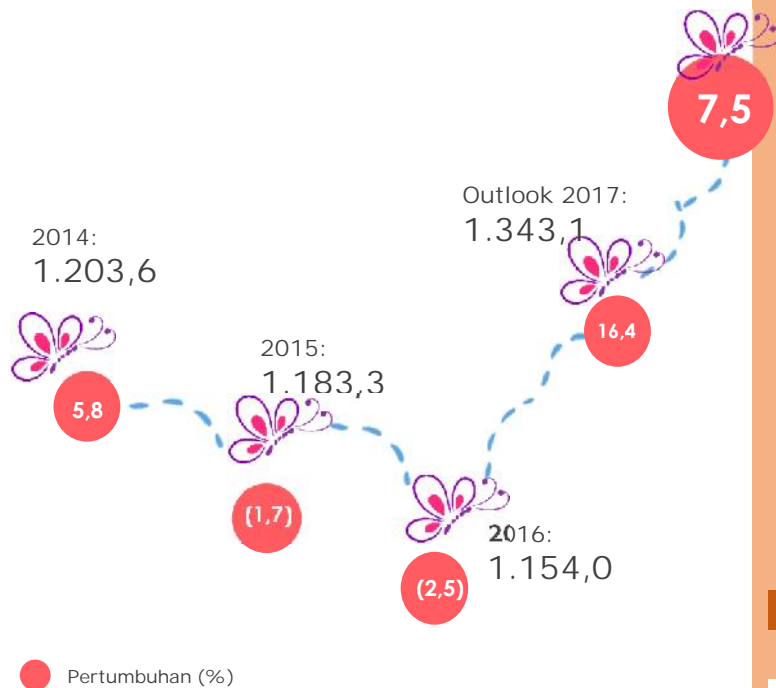
Keseimbangan Primer
(87,3)

Pembiayaan Utang 399,2
Pembiayaan investasi (65,7)



Belanja Pemerintah Pusat

Belanja K/L & non K/L lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial



(triliun rupiah)

Alokasi 2018

1.443,3

Outlook 2017: 1.343,1

Belanja K/L 814,1



- Perbaiki perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan
- Efisiensi belanja operasional
- Monitoring pelaksanaan
- Proses pelelangan yang lebih awal



Belanja Non K/L 629,2

Antara lain:

Pembayaran Bunga Utang
247,6

Perbaiki peringkat surat utang diharapkan memberi dampak positif terhadap penurunan yield SBN.

Subsidi Energi
103,4

Subsidi lebih tepat sasaran dan pengendalian inflasi

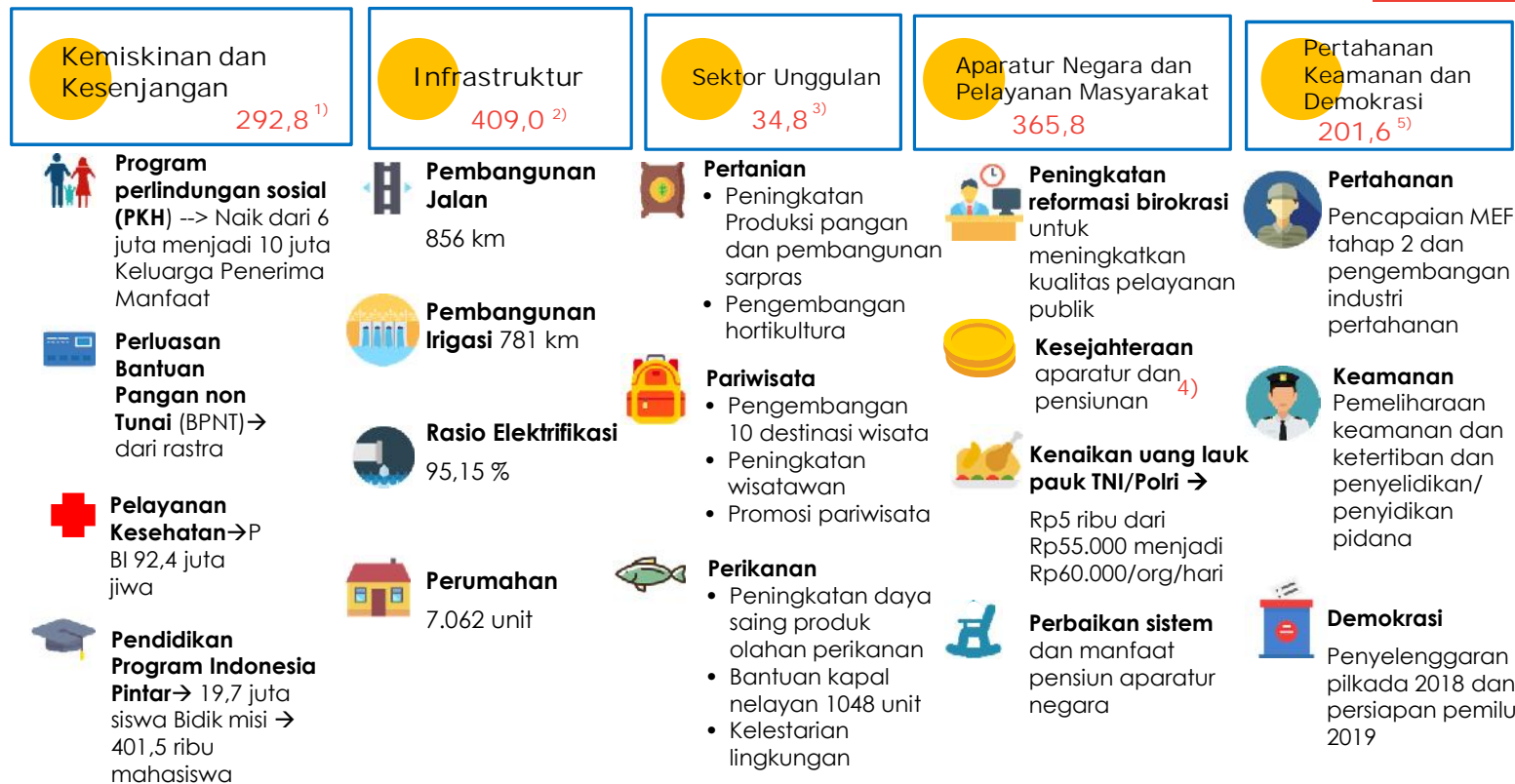
Subsidi Nonenergi
69,0

- Subsidi nonenergi**
- Sinergi dengan bansos dan transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi :
 - Pengendalian inflasi
 - Bantuan masyarakat menengah ke bawah



Fokus Belanja Pemerintah untuk Pembangunan Nasional

(triliun rupiah)



1) Termasuk Dana Desa

2) Termasuk TKDD dan Pembiayaan

3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar

4) Termasuk pensiunan aparat pemda

5) Alokasi Kementan, Polri, KPU, dan Bawaslu



Langkah-langkah peningkatan kualitas belanja K/L



Percepatan Belanja

- Pelelangan awal
- Persiapan dokumen lebih baik



Perbaiki perencanaan dan penganggaran

- Harmonisasi
- Langkah koordinasi lebih awal
- Perbaiki regulasi



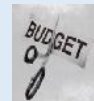
Monitoring secara berkala

- Menggunakan database yang lebih solid
- Melibatkan K/L
- Melakukan evaluasi



Penajaman prioritas

- Sejalan dgn RKP 2018
- Koordinasi antar kegiatan dan stakeholder (K/L, Pemda)



Efisiensi belanja barang

- Mengendalikan belanja operasional
- Menggunakan standar biaya yg efisien



Pemanfaatan IT

- Integrasi sistem informasi Perencanaan dan Penganggaran
- Mengoptimalkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (SPAN)
- Implementasi Pelaksanaan Anggaran

Subsidi lebih tepat sasaran menuju nontunai

Melalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi



(triliun rupiah)

Alokasi 2018

172,4

Outlook 2017: 168,9



Subsidi Energi **103,4**



Subsidi BBM & LPG

51,1

- Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
- Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg



Subsidi Listrik

52,2

- subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA



Subsidi Non-energi **69,0**

antara lain:



Subsidi Pangan **7,3**

- untuk 5,6 juta KPM
- Sinergi subsidi rastra dengan BPNT



Subsidi Pupuk **28,5**

- Penyempurnaan data penerima dengan NIK.
- volume pupuk 9,5 juta ton



Subsidi Bunga Kredit Program **18,0**

- Akses permodalan UMKM
- perumahan bagi MBR



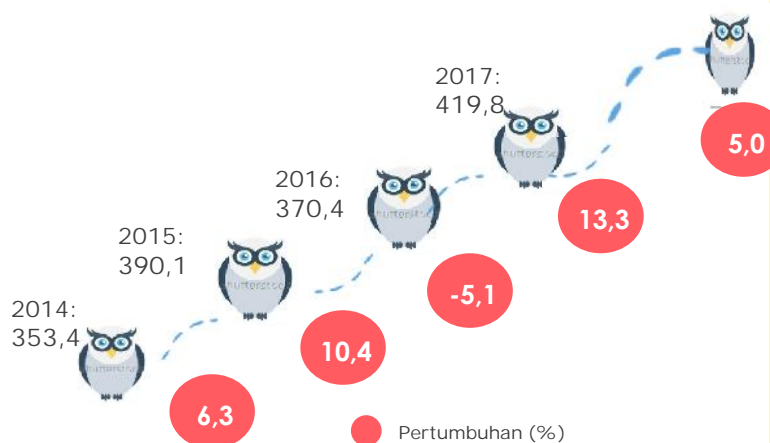
PSO **4,4**

- Pelayanan publik
- LKBN Antara



Anggaran Pendidikan tetap dijaga 20 persen

untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan



Arah kebijakan

1. Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan
2. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah
3. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda
4. Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*)
5. Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk *sustainable education*
6. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin

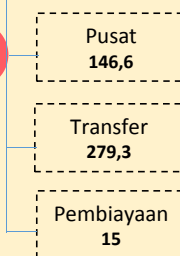


KEMENTERIAN KEUANGAN

(triliun rupiah)

Alokasi 2018

440,9



Sasaran Target

	Program Indonesia Pintar	19,7 Juta Jiwa
	Bantuan Operasional Sekolah	56 juta jiwa
	Beasiswa Bidik Misi	401,5 ribu mahasiswa
	Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas	61,2 ribu
	Tunjangan Profesi Guru	
	• Non PNS	435,9 ribu guru
	• PNS	257,2 ribu guru
	• PNSD	1,2 juta guru

Indikator Pendidikan

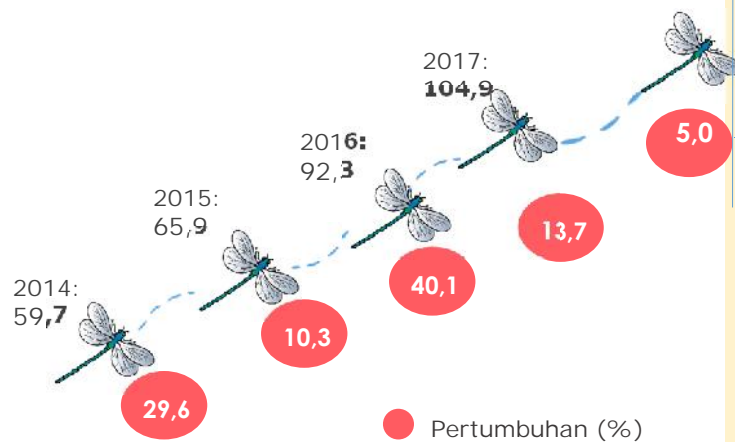
Angka Partisipasi Kasar (APK)	89,7%	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	65,3%
Pendidikan Menengah	88,1%		63,4%

● 2017

● 2018

Anggaran Kesehatan sebesar 5 persen Belanja

untuk meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN



Arah kebijakan

1. Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan
2. Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui
3. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN
4. Meningkatkan peran Pemda untuk *supply side* dan peningkatan mutu layanan

Alokasi 2018

110,2

(triliun rupiah)

Sasaran Target

Pusat 80,7		Program Indonesia Sehat	92,4 juta jiwa
Transfer 29,5		Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	1,8 juta orang
		Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas	49 RS/ Balkes
		Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan	92,5%
		Sertifikasi obat dan makanan	74,0 ribu

Indikator Kesehatan

Stunting	28,8% 29,6%	Persalinan di fasilitas kesehatan	82% 81%
Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	86% 83%		

● 2017 ● 2018



Penanggulangan Kemiskinan dan Dukungan Masyarakat Berpendapatan Rendah

melalui program bantuan sosial, subsidi, dan Dana Desa

(triliun rupiah)

Alokasi 2018

292,8



• Subsidi *)
161,6

*) diluar subsidi pajak



• PKH
17,3



• Program Indonesia Pintar
10,5



• JKN bagi warga miskin/PBI
25,5



• Bantuan Pangan
13,5



• Bidik Misi
4,1



• Dana Desa
60,0

Sasaran (sementara)



Program Keluarga Harapan
10 juta RTS



Penerima Bantuan luran dalam rangka JKN
92,4 juta jiwa



Program Indonesia Pintar
19,7 juta siswa



Subsidi dan Bantuan Pangan
• **15,6 juta** Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
• Perluasan Bantuan Non Tunai



Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
117,7 rb KK



Dana Desa
74.958 Desa



Konektivitas dan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(triliun rupiah)

Alokasi Anggaran Infrastruktur 2018

409,0

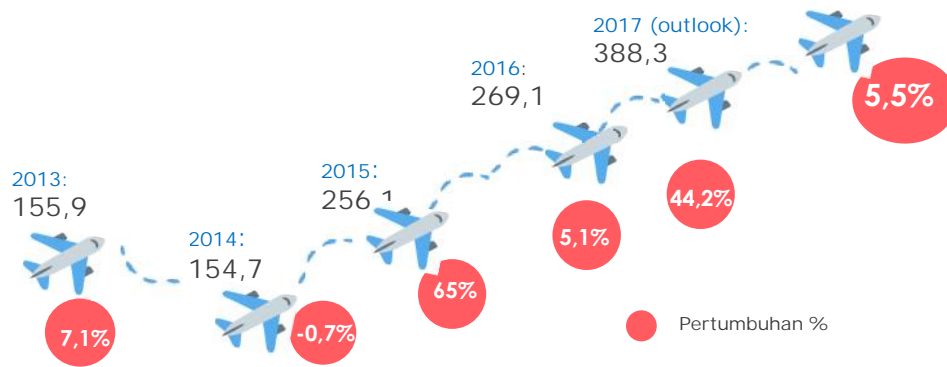
Kemen PUPR 106,9 *

Kemenhub 48,2 *

DAK 33,9

Investasi Pemerintah (PMN & LMAN) 41,5

*) total pagu



Sasaran (sementara)

Pembangunan dan Preservasi Jalan



- Pembangunan Jalan Baru **856 km**
- Pembangunan jalan tol **25 km**
- Pembangunan Jembatan **8.761 m**



Pembangunan jalur KA **639 km'sp**



Pembangunan LRT (lanjutan) **23 km'sp**



Pembangunan Bandara **15 lokasi (kumulatif)**



Informasi dan Telekomunikasi

- Pembangunan desa *broadband* terpadu **100 lokasi**
- Pembangunan BTS di daerah *blankspot*, terutama daerah 3T **380 lokasi**



Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

- Pembangunan Rusun **7.062 unit**
- Bantuan Stimulan (peningkatan/ pembangunan) **180,0 ribu unit**



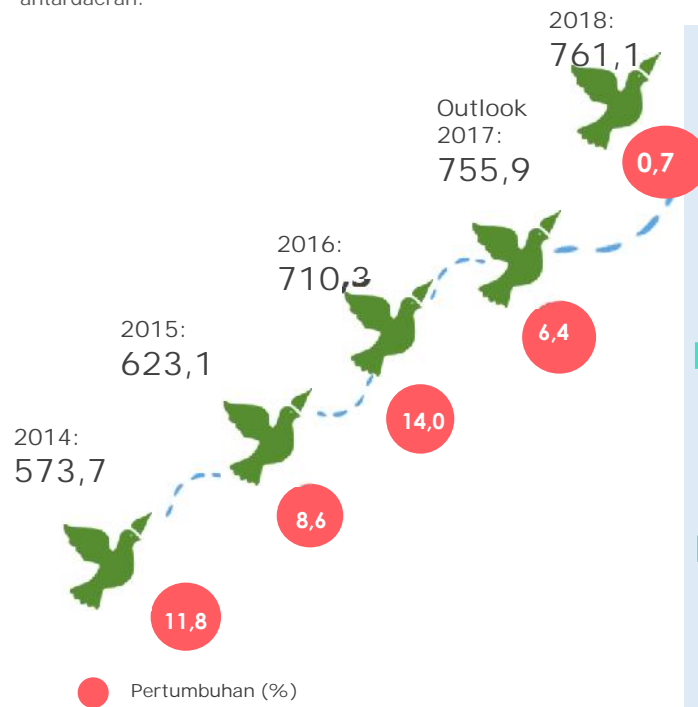
Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.

(triliun rupiah)

Alokasi 2018

761,1



1. Transfer ke Daerah 701,1

Dana Bagi Hasil 87,7

- Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau;
- DBH Dana Reboisasi (DR) selain utk Rehabilitasi Hutan & Lahan, jg penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan & pembenihan.
- 25% untuk belanja infrastruktur.

Dana Alokasi Umum 398,1

- Pagu bersifat dinamis;
- Bobot wilayah laut naik menjadi 100%;
- 25% untuk belanja infrastruktur.

Dana Insentif Daerah 8,5

- Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.

DAK Fisik 62,4

- Mengejar keteringgalan infrastruktur layanan publik;
- Afiriasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

DAK Nonfisik 123,5

- Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran:
 - BOS untuk 47,4 juta siswa;
 - TPG 1,2 juta guru;
 - BOK 9.767 Puskesmas.

Dana Otsus dan Keistimewaan DIY 20,9

- Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan di Aceh, serta mendukung kewenangan keistimewaan dan pembangunan di DIY.

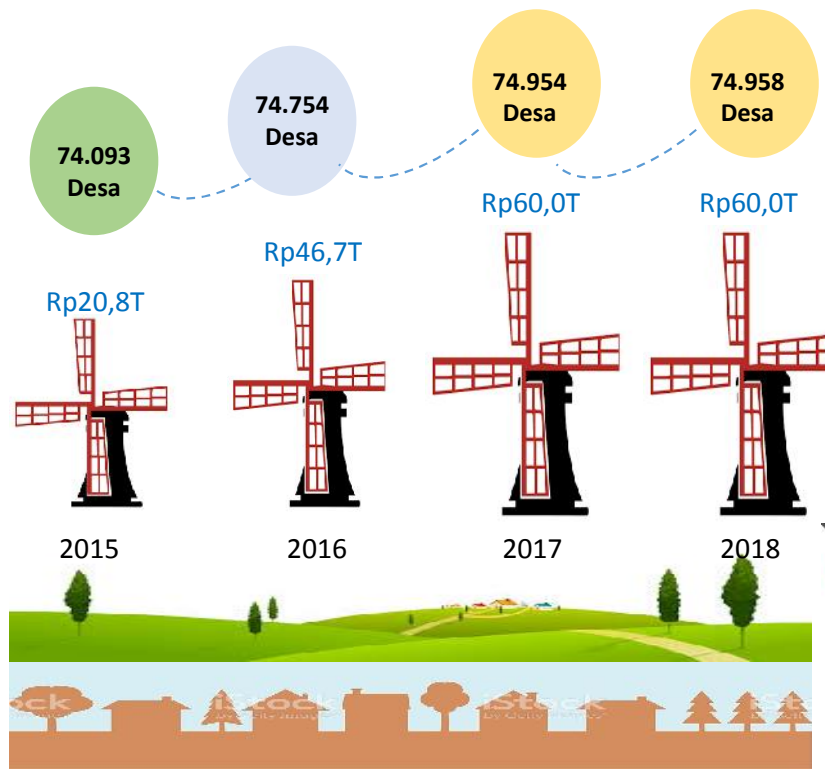
2. Dana Desa 60,0

- Melakukan evaluasi pelaksanaan s.d. tahun 2017
- Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan
 - ✓ Penurunan porsi alokasi yang dibagi merata & peningkatan alokasi formula;
 - ✓ Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin;
 - ✓ Afiriasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.



PENGUATAN DANA DESA DALAM Mendukung NAWACITA DAN DESENTRALISASI FISKAL

Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Pemberian Afiriasi Bagi Desa Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan



Nawa Cita ke-3:
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”



Kebijakan Dana Desa sebagai salah satu instrumen penting desentralisasi fiskal yang berperan strategis untuk:





















- Mengatasi kesenjangan antar daerah.
- Mengentaskan kemiskinan.
- Memberikan afiriasi bagi desa sangat tertinggal dan desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.



Penganggaran dan Distribusi Dana Desa:

- Meningkatkan alokasi Dana Desa dalam APBN hingga 10% dari dan di luar Transfer ke Daerah.
- Penyempurnaan formula distribusi alokasi Dana Desa per Desa dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan.

OUTPUT PENGGUNAAN DANA DESA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

BIDANG PEMBANGUNAN 2016				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2016			
66.179 Km Jalan Desa 	511.484 M Jembatan 	1.366 Unit Tambatan Perahu 	686 Unit Embung 	Kursus pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) 	Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda 	Pelatihan <i>e-marketing</i> & pembuatan <i>website</i> industri rumah tangga 	Pelatihan benih kerapu, tukik serta budidaya cemara & bakau 
13.989 Unit Sumur 	65.573 Unit Drainase & Irigasi 	36.951 Unit MCK 	15.948 Unit Air Bersih 	Pelatihan kuliner & pengembangan makanan lokal 	Pelatihan pengolahan & pemasaran hasil pertanian 	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga 	Pelatihan <i>business plan</i> 
11.221 Unit PAUD 	7.428 Unit Posyandu 	3.100 Unit Polindes 	1.810 Unit Pasar Desa 				

Sumber: Kementerian Desa PDT

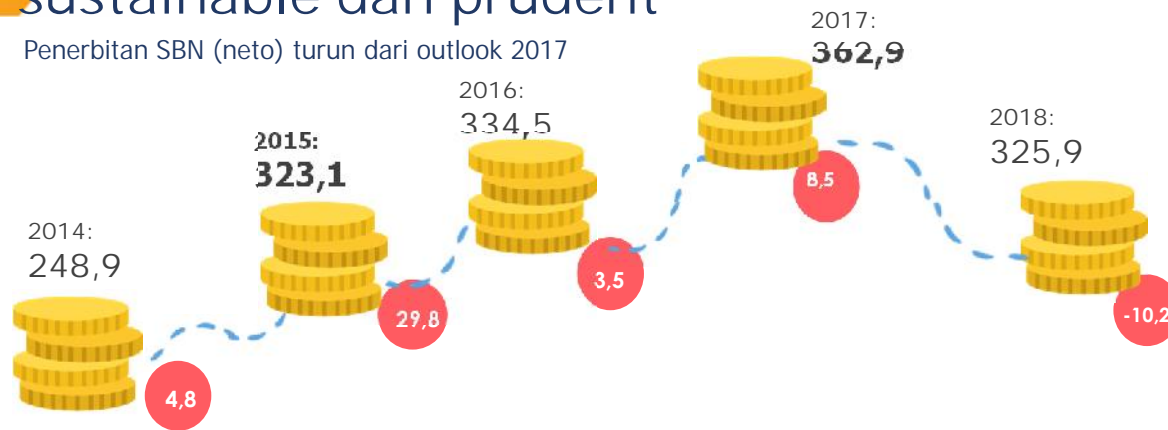
Kontribusi Dana Desa terhadap PDB, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Tahun	PDB	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan
2015	0,39% (+)	0,019% (+)	0,17% (-)
2016	0,82% (+)	0,041% (+)	0,38% (-)

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan

Pembiayaan Anggaran yang lebih sustainable dan prudent

Penerbitan SBN (neto) turun dari outlook 2017



● Pertumbuhan (%)

(triliun rupiah)

Alokasi 2018
325,9

Outlook 2017: Rp362,9 T



Pembiayaan Utang **399,2**

- SBN (neto) **414,7**
- Pinjaman (neto) **(15,5)**



Pemberian Pinjaman **(6,7)**

Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)



Pembiayaan Lainnya **0,2**



Pembiayaan Investasi **(65,7)**

- BUMN: **3,6**
- Lembaga Lainnya: **2,5**
- BLU: **57,4**
- Organisasi/LKI/BUI: **2,1**



Kewajiban Penjaminan **(1,1)**

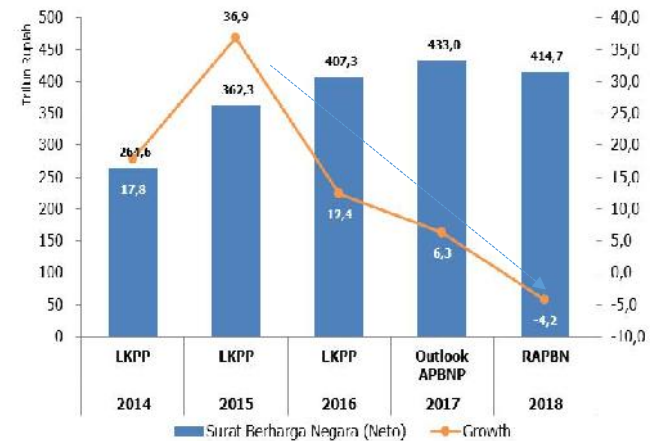
Pembiayaan Utang diupayakan turun

- ✓ diarahkan untuk kegiatan:
 - Produktif
 - Efisien
- ✓ dikelola secara hati-hati

(triliun rupiah)

Alokasi 2018
399,2




Perkembangan SBN, 2014-2018






Arah Kebijakan :

Produktif
pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif:
Mengakselerasi prioritas pembangunan nasional, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pembangunan daerah

Efisiensi
Rasio pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang rendah.

	+/- 5,0%
	5,6%
	18,0%

Hati-hati
menjaga rasio utang terhadap PDB.

	< 30%
	56%
	81%

Strategi :

Menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 30%.

Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna memenuhi pembiayaan pada tingkat biaya dan risiko yang minimal.

Defisit keseimbangan primer (primary balance) turun.

Fokus pada sumber pendanaan dalam negeri.



KEMENTERIAN KEUANGAN

Terima Kasih



KEMENTERIAN



[DJAMENYAPA](#)



[DJAMENYAPA](#)



[#SADARAPBN](#)